

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG PEMAHAMAN SISWA-SISWA SEKOLAH
MENENGAH ATAS TERHADAP PENGAWASAN PEMILU DENGAN JUJUR
DAN ADIL DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DI
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 BANDAR
LAMPUNG**

**Erlina¹, Tubagus M Nasarudin¹, Ahmad Rizky Maulana¹, Arya Panca Laksana¹, Sela
Gustina¹, Faizatul Lailil Baroah¹, Syinthia Cindi Kara¹**

Fakultas Hukum Universitas Malahayati¹

E-mail: erlinamalahayati@email.com*

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan Fakultas Hukum, Universitas Malahayati pemahaman siswa/i SMA Negeri 9 Bandar Lampung mengenai pentingnya pengawasan pemilu yang jujur dan adil. Edukasi dilakukan secara langsung melalui metode ceramah, diskusi interaktif, serta simulasi sederhana yang melibatkan 54 siswa sebagai peserta. Sebelum dan sesudah kegiatan, peserta diberikan pre-test dan post-test untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka berkembang. Hasil pre-test menunjukkan bahwa mayoritas siswa belum memahami konsep dasar pengawasan pemilu, baik dari segi bentuk pelanggaran maupun dampak hukumnya. Namun, setelah mengikuti kegiatan, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman siswa, yang terlihat dari hasil post-test. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif yang interaktif dan komunikatif dapat menjadi strategi efektif untuk membangun kesadaran hukum serta literasi demokrasi di kalangan pelajar. Dengan memahami hak dan kewajiban sebagai pemilih sejak dini, siswa diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu di masa mendatang. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pelibatan sekolah dan perguruan tinggi dalam memberikan pendidikan pemilu yang berkelanjutan dan kontekstual bagi generasi muda. Pengabdian kepada Masyarakat ini diselenggarakan secara luring melalui penyampaian materi yang bersifat interaktif oleh seorang pemateri. Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini mencakup ceramah informatif, simulasi praktik, serta diskusi partisipatif yang melibatkan siswa secara aktif. Untuk menilai tingkat pemahaman peserta, dilakukan evaluasi awal (pre-test) dan evaluasi akhir (post-test) sebagai indikator peningkatan pengetahuan setelah kegiatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan berhasil membantu siswa lebih memahami arti penting pengawasan pemilu, mengenali bentuk-bentuk pelanggaran, serta mengetahui langkah yang harus dilakukan jika melihat kecurangan dalam proses pemilu. Siswa juga mulai menyadari peran mereka sebagai calon pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab di masa depan.

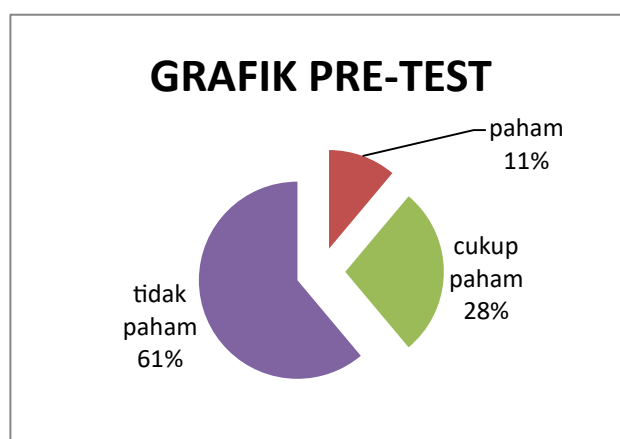
Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Penyuluhan Hukum, Pemilu, Partisipatif.

I. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu tugas utama perguruan tinggi yang bertujuan untuk membawa manfaat nyata bagi masyarakat melalui ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik (R. Hidayat, 2020). Kegiatan ini menjadi jembatan antara kampus dan kehidupan sehari-hari. Melalui pengabdian, dosen dan mahasiswa bisa ikut serta

membantu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar, seperti masalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemilihan umum merupakan bagian penting dari sistem demokrasi yang memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan arah pemerintahan melalui suara mereka (Wibawa, K. C. S, 2019) agar proses ini berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, dibutuhkan sistem pengawasan yang jujur dan adil guna menjaga integritas pemilu serta kepercayaan publik terhadap hasilnya. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955, dan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Saat itu, rakyat memilih anggota DPR dan Konstituante dalam suasana yang relatif bebas dan terbuka (Ulfiyyati, 2023). Sayangnya, semangat demokrasi ini tidak bertahan lama. Ketika Presiden Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959, pemilu tidak lagi dilaksanakan secara rutin. Sebelum masa pemerintahan Orde Baru, pemilu kembali digelar mulai tahun 1971 dan dilaksanakan setiap lima tahun. Namun, sistemnya sangat terbatas: hanya tiga partai yang boleh ikut serta, dan hasil pemilu nyaris selalu memenangkan satu pihak (Li, S., Park, 2019).

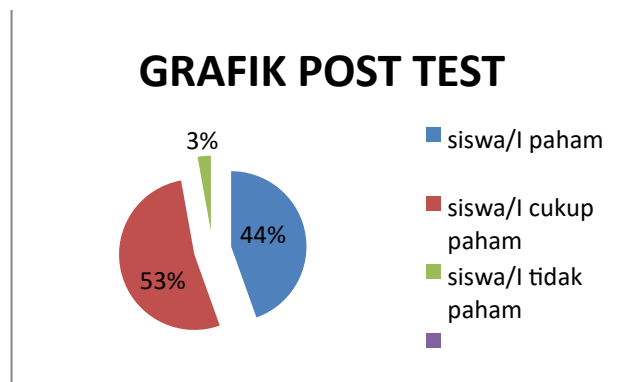
Perubahan besar terjadi setelah reformasi tahun 1998, yang menandai dimulainya era demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu tahun 1999 menjadi pemilu pertama setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan diikuti oleh puluhan partai politik. Sejak saat itu, sistem pemilu di Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, termasuk pelaksanaan pemilihan presiden langsung sejak tahun 2004, serta pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah (Pilkada) yang lebih terbuka (Maulani, 2024). Hasil dari pre-test yang diberikan sebelum kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa/i terhadap pengawasan pemilu dengan jujur dan adil masih kurang. Sekitar 61% siswa/i tidak paham mengenai pengawasan pemilu dengan jujur dan adil. Sisiwa/i hanya 11% siswa yang paham mengenai pengawasan pemilu dan 28% orang yang cukup paham dengan pengawasan pemilu. Data tersebut dapat dilihat secara jelas dalam grafik yang menunjukkan distribusi tingkat pemahaman siswa/i terhadap pengawasan pemilu dengan jujur dan adil.



Grafik 1 Hasil Pre-Test

Grafik di atas memperlihatkan mayoritas Siswa/i SMA Bandar Lampung tidak paham terhadap Pengawasan Pemilu Jujur dan Adil. Hal ini terlihat dari hasil grafik pretest yang

diambil sebelum kegiatan sosialisasi dimulai. Rendahnya skor yang diperoleh menunjukkan bahwa masih ada jarak yang cukup lebar antara materi hukum yang seharusnya dipahami dengan pengetahuan praktis yang dimiliki oleh para siswa di lapangan. Berawal dari masih rendahnya pemahaman siswa terkait isu kekerasan seksual (Rafid, R, 2025), Fakultas Hukum Universitas Malahayati menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang rutin dilaksanakan setiap tahun di berbagai SMA di Provinsi Lampung secara berkesinambungan. Program ini menjadi kegiatan pembuka pada tahun 2025, dengan fokus utama membangun kesadaran hukum di kalangan pelajar, khususnya sejalan dengan visi Fakultas Hukum dan mendukung kebijakan nasional dalam mendorong literasi hukum sejak dini. Edukasi yang diberikan tidak hanya terbatas pada pengetahuan umum tentang hukum, namun juga menyoroti pentingnya memahami isu-isu aktual seperti pemilu yang adil serta berintegritas. Sebagai bentuk evaluasi atas kegiatan ini, para siswa diberikan tes setelah kegiatan berlangsung (post test). Evaluasi ini dilakukan untuk melihat seberapa efektif penyampaian materi yang telah dilakukan sekaligus mengukur peningkatan pemahaman siswa. Instrumen tes disusun berdasarkan topik yang telah disampaikan selama sesi sosialisasi, terutama yang berkaitan jujur dan adil, serta nilai-nilai hukum yang mendasarinya .



Grafik 2 Hasil Post Test

Berdasarkan grafik ini, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa/i berada pada kategori cukup paham terhadap materi yang disampaikan, yaitu sebesar 53%. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki gambaran umum tentang materi, tetapi belum sepenuhnya menguasainya. Sementara itu, 44% siswa/i benar-benar memahami materi dengan baik, yang artinya mereka bisa mengikuti penjelasan secara menyeluruh dan mampu menghubungkannya dengan konteks nyata atau aplikatif. Menariknya, hanya 3% siswa/i yang tidak memahami materi sama sekali. Ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa setidaknya sudah memiliki dasar pemahaman meskipun ada ruang untuk meningkatkan pemahaman mereka lebih dalam lagi.

II. METODE PELAKSANAAN

Fakultas Hukum Universitas Malahayati kembali menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan secara langsung (offline) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan diikuti oleh 54 siswa/i sebagai peserta aktif. Fokus utama kegiatan adalah memberikan edukasi tentang pengawasan pemilu yang jujur dan adil, tema yang sangat penting dalam memperkuat partisipasi demokratis di kalangan pelajar sejak dini¹. Kegiatan berlangsung dalam suasana interaktif, diawali dengan pemaparan materi oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi terbuka dan tanya jawab. Para siswa diajak memahami peran mereka sebagai calon pemilih cerdas, sekaligus mengenali bentuk-bentuk pelanggaran dalam proses pemilu, seperti politik uang, manipulasi suara, dan penyebaran informasi menyesatkan. Selain ceramah, pendekatan edukatif juga dilakukan melalui simulasi sederhana, di mana siswa memerankan berbagai pihak dalam proses pemilu, seperti panitia pemilihan, pengawas, dan peserta pemilu. Metode ini membantu peserta memahami bagaimana sistem pengawasan pemilu bekerja dan pentingnya kejujuran serta keadilan dalam pelaksanaan demokrasi.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan, peserta diberikan pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah materi disampaikan. Instrumen tes disusun sesuai dengan topik yang dibahas selama sesi berlangsung. Hasil evaluasi kemudian diklasifikasikan dalam tiga kategori pemahaman Paham (nilai 100–75), Cukup Paham (nilai 70–50), Tidak Paham (nilai 50–0). Dari pengolahan data hasil tes, terlihat adanya peningkatan pemahaman signifikan setelah siswa mendapatkan materi, yang menunjukkan efektivitas metode yang digunakan dalam kegiatan ini. Kegiatan ini menjadi bukti konkret bahwa keterlibatan kampus dalam edukasi demokrasi kepada generasi muda mampu membentuk budaya politik yang sehat dan berintegritas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang proses dan pengawasan pemilu, siswa diharapkan menjadi bagian dari masyarakat yang kritis dan aktif dalam menjaga kualitas demokrasi.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pemahaman siswa/i mengenai pentingnya pengawasan pemilu yang jujur dan adil merupakan elemen kunci dalam membangun budaya demokrasi sejak usia sekolah. Pendidikan politik di lingkungan sekolah, jika dilakukan secara benar, dapat menjadi pondasi awal terbentuknya generasi yang sadar hukum dan aktif dalam mengawal jalannya demokrasi (Putri, 2023). Sayangnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman ini masih sangat terbatas di kalangan pelajar. Berdasarkan hasil pre-test yang diperoleh sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, ditemukan bahwa sebagian besar siswa belum memahami secara menyeluruh apa itu pengawasan pemilu yang jujur dan adil baik dari segi definisi, bentuk praktiknya, dampak sosialnya, maupun konsekuensi hukumnya. Hasil ini tampak jelas dalam grafik awal yang menunjukkan sebagian besar siswa masuk kategori "tidak paham".

Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan pengetahuan yang cukup lebar antara konsep hukum pemilu yang berlaku secara formal dan pemahaman praktis siswa di sekolah. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab rendahnya pemahaman ini antara lain: kurangnya materi hukum yang disampaikan secara sistematis di sekolah, terbatasnya pemahaman guru terhadap topik pengawasan pemilu, serta minimnya pengalaman langsung

siswa dalam kegiatan yang berkaitan dengan edukasi hukum atau politik praktis. Rendahnya pengetahuan siswa bukan berarti mereka tidak tertarik pada isu ini. Justru sebaliknya, mayoritas siswa menunjukkan antusiasme yang tinggi saat diberikan ruang dialog dan kesempatan untuk belajar melalui pendekatan yang interaktif dan menyenangkan. Permasalahan utamanya lebih mengarah pada kurangnya akses terhadap informasi hukum yang relevan, tidak terbukanya ruang diskusi di sekolah terkait isu kepemiluan, serta belum terintegrasinya materi hukum pemilu dalam kurikulum pendidikan. Sebagai solusi, Fakultas Hukum Universitas Malahayati melaksanakan kegiatan edukasi melalui ceramah dan diskusi aktif. Metode ini memungkinkan siswa terlibat secara langsung dalam memahami substansi pengawasan pemilu dan dampaknya bagi demokrasi. Berdasarkan hasil post-test yang dilakukan setelah sesi edukasi, ditemukan peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Grafik hasil akhir menunjukkan banyak siswa yang awalnya tidak paham, kini berada pada kategori "cukup paham" hingga "paham", yang menjadi indikator bahwa pendekatan yang digunakan berhasil dan tepat sasaran



Gambar 1 Tanya Jawab Menggunakan Media PPT oleh Pemantik

Hasil dari pre-test yang diberikan sebelum kegiatan Pengabdian Masyarakat di SMA Negeri 9 Bandar Lampung diketahui bahwa tingkat pemahaman siswa/i terhadap pengawasan pemilu dengan jujur dan adil masih kurang. Sekitar 61% siswa/i tidak paham mengenai pengawasan pemilu dengan jujur dan adil. Siswa/i hanya 11% siswa yang paham mengenai pengawasan pemilu dan 28% orang yang cukup paham dengan pengawasan pemilu. Penyampaian materi kepada siswa/i SMA Negeri 9 Bandar Lampung melalui ceramah dan diskusi interaktif terbukti menjadi pendekatan yang efektif dalam memperluas wawasan mereka mengenai pengawasan pemilu yang jujur dan adil. Melalui metode ini, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pemateri, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, dan berbagi pandangan terkait pengalaman atau pemahaman mereka sebelumnya.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mulai mampu mengenali beragam bentuk pengawasan dalam proses pemilu, termasuk bagaimana pelanggaran dapat terjadi dan cara menanggapi jika menyaksikan ketidakadilan dalam pemilu. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta bagaimana bersikap kritis dan bertanggung jawab jika suatu saat menjadi peserta pemilu di masa depan. Dengan pendekatan yang komunikatif dan melibatkan siswa secara langsung, kegiatan ini telah berhasil membangun kesadaran awal tentang pentingnya

keterlibatan aktif generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi (Permana, A. A, 2025). Dalam materi oleh pemantik dan pembagian souvenir bahwa sebagian besar siswa/i berada pada kategori cukup paham terhadap materi yang disampaikan, yaitu sebesar 53%. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki gambaran umum tentang materi, tetapi belum sepenuhnya menguasainya. Sementara itu, 44% siswa/i benar-benar memahami materi dengan baik, yang artinya mereka bisa mengikuti penjelasan secara menyeluruh dan mampu menghubungkannya dengan konteks nyata atau aplikatif. Menariknya, hanya 3% siswa/i yang tidak memahami materi sama sekali. Ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa setidaknya sudah memiliki dasar pemahaman meskipun ada ruang untuk meningkatkan pemahaman mereka lebih dalam lagi.

Melihat dampak positif yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, sangat disarankan agar kegiatan serupa tidak berhenti sampai di sini. Seluruh siswa/i SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebaiknya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti edukasi serupa, tidak hanya sebagai program satu kali, tetapi juga melalui kegiatan lanjutan yang terstruktur dan berkelanjutan dengan dukungan dari pihak sekolah. Pengenalan materi mengenai pengawasan pemilu sangat penting, bukan hanya untuk menambah wawasan siswa, tetapi juga untuk membentuk kesadaran hukum sejak dini. Melalui pemahaman ini, siswa diharapkan mampu mengenali berbagai bentuk pengawasan pemilu, memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, serta mengetahui langkah yang dapat mereka ambil apabila suatu saat menemukan pelanggaran pemilu, baik yang terjadi pada diri mereka sendiri maupun di lingkungan sekitar

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang mengangkat tema pengawasan pemilu yang jujur dan adil terbukti memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran demokratis siswa/i SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Melalui pendekatan yang interaktif berupa ceramah, diskusi, dan simulasi siswa diajak memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya menjadi tugas penyelenggara pemilu, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara, termasuk generasi muda. Berdasarkan hasil pre-test, sebanyak 68% siswa berada pada kategori tidak paham, 24% dalam kategori —cukup paham, dan hanya 8% yang tergolong paham terhadap materi pengawasan pemilu. Setelah kegiatan dilakukan, hasil post-test menunjukkan perubahan yang cukup signifikan, yakni 45% siswa berada dalam kategori paham, 40% cukup paham, dan hanya 15% yang masih berada di kategori —tidak paham. Data ini mencerminkan bahwa pendekatan edukatif yang diterapkan mampu menjembatani kesenjangan pengetahuan hukum yang sebelumnya terjadi. Siswa juga mulai memahami berbagai bentuk pelanggaran dalam proses pemilu seperti politik uang dan intimidasi, serta langkah apa yang bisa mereka lakukan apabila menghadapi situasi tersebut. Selain itu, mereka mendapatkan pemahaman yang lebih kuat tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih serta pentingnya menjaga nilai kejujuran dan integritas dalam demokrasi. Secara keseluruhan, kegiatan ini membuktikan bahwa pendidikan hukum pemilu yang dikemas secara komunikatif dan partisipatif sangat efektif dalam membangun kesadaran hukum sejak dini. Harapannya, kegiatan serupa dapat diperluas cakupannya ke sekolah-sekolah lain agar semakin banyak pelajar yang memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam mengawal proses demokrasi yang bersih dan adil.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Zulfa, N. S. (2025). *Menyulam Karakter Anak: Melalui Literasi Kewarganegaraan*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Maulani, G., Saptadi, N. T. S., Wolo, H. B., Purnomo, A. C., Tangko, L. A. A., Suyitno, M., ... & Perang, B. (2024). *Pendidikan kewarganegaraan*. Sada Kurnia Pustaka.

Jurnal

- Al-Ra'zie, Z. H., Mulyasari, M., Lestari, A., Nabila, S., Sari, W. P., & Winda, W. (2025). Pentingnya Pendidikan Politik di Era Digital untuk Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(7), 3651-3657.
- Waskita, D. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Demokrasi Di Kalangan Remaja. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 2(1), 1-6.
- Li, S., Park, S. H., & Bao, R. S. (2019). The transition from relation-based to rule-based governance in East Asia: Theories, evidence, and challenges. *International Rafid*, R., Nurita, R. F., Pratama, R., Hidayat, A. T., Triawati, I., & Nasir, M. (2025). Peran Pendidikan Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat: Studi Kualitatif pada Siswa Sekolah di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 561-570.
- R. Hidayat & F. Kurniawati, Pengabdian kepada Masyarakat sebagai Bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi: Studi Kasus pada Dosen Perguruan Tinggi Swasta, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 12–20.
- Wibawa, K. C. S. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615-628.
- Ulfiyyati, A., Muhamad, R., & Akbari, I. S. (2023). Demokrasi: tinjauan terhadap konsep, tantangan, dan prospek masa depan. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 435-444.